

**Kabar**  
2 Bamboedoea - LKBN Antara  
Gelar Seminar Penguatan  
Platform PR Bangsa

**Teropong**  
6 Pelantikan BPP Perhumas  
Periode 2014 - 2017

**PR Corner**  
8 Menengok Trend Social  
Media dan PR

## Peluncuran Buku PR in Government

# Agar Humas Pemerintah Tak Ketinggalan Kereta



CEO Bamboedoea Heri Rakhmadi berfoto bersama beberapa tokoh dan praktisi kehumasan pada acara peluncuran Buku "PR In Governmet", Jakarta, 17-02-2015.

**S**atu lagi hadir buku tentang praktik kehumasan di Indonesia. Namun, kali ini dapat dikatakan, buku ini adalah buku pertama dan masih satu-satunya yang meneropong praktik PR di kementerian/ lembaga (K/L) selama 20 tahun terakhir ini. Buku bertajuk PR in Government: Bunga Rampai Program Kehumasan Pemerintah ini adalah ulasan pengalaman Bamboedoea Komunikasi dalam mengelola humas di 20 Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia. Buku ini memaparkan bagaimana upaya sebuah Konsultan PR profesional merubah paradigma humas pemerintah yang selama ini dianggap 'tidak penting' menjadi yang terdepan utamanya dalam meningkatkan citra dan reputasi K/L di mana mereka bertugas.

Menurut CEO Bamboedoea Heri Rakhmadi, buku ini sengaja memberi judul "PR in Government" dengan tujuan yang sederhana yakni menawarkan suatu model implementasi humas pemerintah (*Government Public Relations*) yang selama ini memang di nilai perlu diperkuat lantaran posisi humas pemerintah yang selalu tertinggal dalam melakukan komunikasi publik. "Karena itu, para pimpinan atau pejabat yang

diberi tanggung jawab mengelola program-program humas pemerintah tidak perlu ragu untuk membangun sinergi dengan siapapun agar humas pemerintah tidak lagi ketinggalan kereta," ujarnya dalam peluncuran Buku PR in Government: Bunga Rampai Program Kehumasan Pemerintah di Wisma Antara, Jakarta (17/02).

Dirjen Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H. Tulung yang hadir dalam peluncuran mengatakan, bahwa bagi lembaga pemerintahan, menjaga reputasi atau nama baik merupakan keharusan agar publik senantiasa percaya terhadap kinerjanya. Di sinilah humas atau public relations berperan strategis. Dari sisi kehumasan, ada banyak hal teknis yang bisa dilakukan. "Di buku ini, Bamboedoea memaparkan detailnya dalam data, angka, dan foto," ujar Freddy.

Sementara, menurut Direktur Pemberitaan Metro TV Suryoprato, di era yang semakin terbuka dan masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat, seharusnya upaya untuk mengomunikasikan kebijakan yang hendak ditempuh, semakin intensif dilakukan. Bahkan

pemerintah harus semakin cermat dalam membangun komunikasi, karena masyarakat sekarang lebih kritis sehingga harus ada upaya ekstrakeras untuk bisa meyakinkan masyarakat. Di sinilah buku ini menjadi relevan untuk menjelaskan pentingnya pemerintah membangun komunikasi," tutur Tommy.

Buku ini diberi pengantar oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H. Tulung dan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryoprato dan disertai komentar 20 tokoh diantaranya Ketua DPD Irman Gusman; Ketua KPU Husni Kamil Manik; Mustafa Abubakar (Menteri BUMN 2009-2011); Hamid Awaluddin (Menkumham 2004-2007); Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara); Arifin Asyhad (Pemred detik.com); Usman Kansong (Direktur Pemberitaan Media Grup); dan Agung Laksamana (Ketua BPP Perhumas), di dalamnya banyak terdapat pelajaran dan pengalaman yang bisa dipetik terutama oleh para pelaku humas pemerintah bagaimana menjadi humas yang efektif dan menjadi garda terdepan institusinya masing-masing.

## Antara - Bamboedoea PR Platform

## Gelar Seminar Penguatan Platform PR Bangsa



Suasana Seminar Kehumasan Penguatan Platform PR Bangsa yang di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta (17-02-2015)

Bertempat di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta pada 17 Februari 2015, digelar sebuah seminar kehumasan yang cukup menarik bertajuk “Penguatan Platform PR Bangsa” yang diselenggarakan oleh Antara-Bamboedoea PR Network. Seminar yang menghadirkan Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Saiful Hadi sebagai pembicara kunci ini dihadiri para humas kementerian/ lembaga, praktisi kehumasan, dan beberapa tokoh antara lain Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua BPP Perhumas Agung Laksamana, Dewan Kehormatan PWI Pusat Asro Kamal Rokan, Anggota Dewas TVRI Elprisdad, founder LSPR Prita Kemal Gani, dan Pheni Khalid (UNDP).

Menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H. Tulung; Direktur Pemberitaan Metro TV Suryoprato; dan CEO Bamboedoea Heri Rakhmadi yang juga wakil ketua umum BPP Perhumas, seminar ini membahas kondisi kekinian humas pemerintah, tantangan, serta solusinya agar bisa berperan besar untuk meningkatkan reputasi bangsa di dalam negeri dan di dunia internasional.

Dalam paparannya, Saiful Hadi menekankan bahwa ditengah

membanjirnya informasi saat ini, publik tidak lagi dihadapkan pada persoalan mencari informasi, tetapi lebih disibukkan untuk memilih informasi. Begitu juga kalangan media, semakin selektif menempatkan konten pemberitaannya. Masalahnya, dalam situasi demikian, humas pemerintah selalu tertinggal dalam melakukan komunikasi publik. “Aktor non-pemerintah lebih sering tampil di media massa dibandingkan pejabat pemerintah. Aktor non-pemerintah lebih bisa membangun komunikasi publik melalui media massa yang jauh lebih efektif dibandingkan pemerintah,” paparnya.

Freddy H. Tulung mengatakan, satu di antara kompetensi pengetahuan praktisi PR yang perlu dikuasai adalah manajemen isu (issue management). Manajemen isu merupakan salah satu alat (*tool*) dalam aktivitas PR. Saat ini, manajemen isu banyak dipakai perusahaan atau korporasi hingga lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan publik. Di Indonesia, manajemen isu juga diterapkan oleh lembaga seperti Kepresidenan.

Dalam praktiknya, manajemen isu berperan strategis untuk menentukan langkah lanjutan dari diseminasi pesan maupun upaya membangun citra baik sebuah lembaga. Secara teknis, diseminasi pesan ini juga harus diperhitungkan secara baik. Siapa komunikatornya dan siapa audiensnya ikut menentukan

bagaimana cara mengemas pesan yang akan disajikan kepada publik secara langsung maupun kepada pekerja media. “Bagi lembaga pemerintahan, menjaga reputasi atau nama baik merupakan keharusan agar publik senantiasa percaya terhadap kinerjanya. Di sinilah humas atau public relations berperan strategis,” jelasnya.

Sementara itu, Suryoprato menekankan tantangan pemerintah yang harus hadir untuk selalu membangun komunikasi yang baik agar bisa memberikan pemahaman yang tepat tentang apa yang akan pemerintah lakukan bagi perbaikan kehidupan seluruh warga bangsa di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini.

“Di era yang semakin terbuka dan masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat, seharusnya upaya untuk mengkomunikasikan kebijakan yang hendak ditempuh, semakin intensif dilakukan. Bahkan pemerintah harus semakin cermat dalam membangun komunikasi, karena masyarakat sekarang lebih kritis sehingga harus ada upaya ekstrakeras untuk bisa meyakinkan masyarakat,” urainya.

Sedangkan Heri Rakhmadi mengurai secara tajam berbagai persoalan yang dihadapi humas pemerintah dan memaparkan solusi serta langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan menuju humas pemerintah yang efektif. Menurut Heri, selama 20 tahun mengelola humas di pemerintahan, Bamboedoea sangat memahami persoalan yang dihadapi humas pemerintah, mulai dari anggaran, SDM terbatas hingga kesulitan untuk menyakinkan atasan bahwa humas itu posisinya strategis.

“Ini menjadi persoalan klasik. Namun, Bamboedoea juga menghadapi hal ini saat mengelola PR diberbagai kementerian/ lembaga. Semua persoalan ini kami siasati dengan kreativitas tanpa batas dalam meng-*create* program dan kegiatan kehumasan. Persoalan SDM juga bisa diretas lewat rekrutmen ideal dan rutin mengadakan peningkatan kapasitas berkelanjutan. Atasan bisa diyakinkan lewat perencanaan program PR yang baik dan kinerja yg terukur,” jelas Heri.

## Peran Humas Pemerintah

## Tantangan di Era Reformasi

Ada hal menarik dari pernyataan Freddy H. Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia saat menjadi pembicara dalam peluncuran buku “PR in Government. Bunga Rampai Program Kehumasan di Pemerintahan,” Sesala, (17/2). Menurutnya, sambil menytir ungkapan sejarawan Anhar Gonggong, peran humas sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dimulai dari era perjuangan kemerdekaan sejak terbentuknya Boedi Oetomo (1908) dan Sumpah Pemuda (1928). Saat itu, terjadi proses transformasi dari perjuangan fisik bersenjata, terkotak-kotak/etnis dan wilayah menjadi perjuangan non-fisik dalam bentuk komunikasi publik tentang nasionalisme. “Tentunya, perjuangan diplomasi dilakukan dengan pendekatan kehumasan,” tutur Freddy H. Tulung.

Pendekatan kehumasan pada masa itu mampu menjembatani perbedaan (Suku, Agama, Ras, Etnis) untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Di era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, peran kehumasan juga menjadi peranan yang signifikan dalam mempererat kesatuan bangsa. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah masihkah humas memanfaatkan Informasi dan Komunikasi menjadi alat untuk persatuan bangsa? Menjadi alat untuk melaksanakan edukasi publik? Menjadi instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga?

Menurut Freddy saat ini Indonesia tidak hanya menghadapi era globalisasi tapi juga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta demokratisasi. Tiga hal tersebut menimbulkan beberapa gejala negatif yang patut diwaspadai seperti intoleransi, kekerasan, potensi konflik, loyalitas primordial, keterbukaan, dan dekadensi moral. Selain itu juga muncul ruang publik yang semakin demokratis – bahkan cenderung anarkis. Kebebasan sipil, pluralisme, dan sistem media yang independen semakin mengemuka. Semua pihak dapat memperbincangkan



*Freddy H. Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, saat seminar Kehumasan Penguatan Platform PR Bangsa (17-02-2015)*

persoalan publik. Tidak ada lagi ruang privat yang bebas dari informasi. Semua bisa dipenetrasi. Begitu juga dengan ruang publik. Menurut Freddy semua hal tersebut terjadi lantaran akses publik terhadap informasi kian meningkat dan pola komunikasi semakin dinamis.

Dalam situasi seperti itu, lanjut Freddy, upaya pemerintah untuk menjalankan *Government Public Relations* (GPR) perlu dikedepankan. Menurut Freddy GPR merupakan pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap penyelenggara negara. GPR mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting meliputi dua hal yakni manajemen informasi dan manajemen reputasi. Dalam rangka implementasi GPR, tambah Freddy saat ini tengah digodok rancangan konsep dan strategi implementasinya melibatkan Kominfo, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kepala Staf Unit Kepresidenan. Implementasi GPR merupakan komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam merealisasikan agenda strategis pembangunan, khususnya Nawa Cita kedua yang menyatakan pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk tujuan

tersebut pemerintah berkomitmen mengedepankan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik.

Terkait peran humas dalam mempererat persatuan dan memperkokoh ketahanan nasional, tambah Freddy terdapat empat prinsip yang harus dikedepankan yaitu: *mutual interactive* (saling kenal); *mutual understanding* (saling paham); *mutual respect* (saling hormat); dan *mutual benefit* (saling untung). Selain itu, humas juga dapat berperan dengan menjadi motor penggerak dalam membangun dan membentuk karakter bangsa melalui strategi edukasi, mencerahkan, memberdayakan, dan cinta kepada tanah air. Dalam era globalisasi, kata Freddy, seperti dikatakan Thomas Friedman penulis buku *The Lexus and the Olive Tree*, betapa pentingnya akar kebangsaan (seperti pohon zaitun) yang kuat. Bila akar kebangsaan tidak kuat, pohon zaitun ini akan hancur terlindas mobil mewah Lexus (yang merepresentasikan globalisasi). “Dalam konteks itu, maka peran humas pemerintah dalam membentuk jati diri bangsa dalam menghadapi konsekuensi globalisasi menjadi sangat penting,” ujar Freddy.

# Reformasi

## Mengubah Cara Kita Berkomunikasi



Suryoprato, Direktur Pemberitaan Metro TV, saat seminar Kehumasan Penguatan Platform PR Bangsa (17-02-2015)

**D**alam paparannya Direktur Pemberitaan Metro TV yang juga host program TV Economic Challenges Suryoprato menggugah kesadaran kita bahwa selain perubahan sistem politik yang kemudian diikuti oleh perubahan di berbagai bidang lainnya, reformasi telah mengubah cara berkomunikasi rakyat Indonesia. Memang, runtuhnya orde baru membawa perubahan signifikan dalam berbagai kehidupan negeri ini. Bandul perubahan politik telah membawa konsekuensi perubahan keberbagai bidang kehidupan bangsa ini mulai dari ekonomi, sosial budaya, hukum, kesejahteraan sosial, dan berbagai bidang kehidupan lainnya.

“Satu yang tidak pernah kita sadari, perubahan sistem politik itu mengubah cara berkomunikasi yang ada di tengah masyarakat. Di era demokrasi keterbukaan menjadi sebuah tuntutan. Masyarakat menjadi kelompok yang *“demanding”* dan tidak pernah menerima begitu saja informasi yang didapatkan,” ujar Tommy—sapaan akrab Suryoprato membuka diskusi.

Perubahan cara berkomunikasi ini, lanjut Tommy terlengkapi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa. Saat ini, kita hidup di era teknologi informasi yang membuat bukan hanya informasi

mudah untuk diakses, tetapi masyarakat pun bebas untuk ikut mengomentari peristiwa yang dirasakannya. Kita bisa rasanya ramainya perbincangan di media sosial, begitu sebuah peristiwa mencuat. Dengan segala pemahaman dan cara berkomunikasi yang dimiliki, semua seakan bebas berkomentar. Mulai dari yang bahasanya terpelajar sampai yang menggunakan bahasa jalanan, semua muncul di media sosial.

“Reformasi sendiri terjadi bukan semata-mata untuk kebebasan. Reformasi dipilih karena kita ingin terjadi perubahan yang dilakukan secara bertahap, tetapi terus menerus terjadi demi perbaikan kehidupan seluruh rakyat. Kita selalu mengatakan bahwa demokrasi bukan sekadar hanya untuk sekadar bebas berbicara. Demokrasi harus juga ditujukan bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Untuk itulah maka kita tidak cukup hanya sekadar menerapkan *“talking democracy”*, tetapi yang tidak kalah pentingnya mengembangkan *working democracy*,” jelasnya.

Pada tahapan itulah, tambah Tommy, pemerintah harus menjalankan peran untuk mengedukasi masyarakat. Mereka harus hadir untuk selalu membangun komunikasi yang baik agar bisa memberikan pemahaman yang tepat

*Sekarang di era yang semakin terbuka dan masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat, seharusnya upaya untuk mengomunikasikan kebijakan yang hendak ditempuh, semakin intensif dilakukan.*

tentang apa yang akan kita lakukan bagi perbaikan kehidupan seluruh warga bangsa.

“Di era otoriter komunikasi yang dibangun pemerintah sungguh luar biasa. Sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Prof Widjojo Nitisastro misalnya, selalu melakukan pertemuan reguler dengan pimpinan media massa. Meski pun hanya bersifat latar belakang, namun pers diberi pemahaman tentang langkah yang akan ditempuh pemerintah dan target yang ingin dicapai dari kebijakan yang akan ditempuh tersebut. Padahal, pemerintah bisa saja berjalan sendiri dan pers tidak punya keberanian untuk menentang kebijakan tersebut,” kenang jurnalis senior ini.

Sekarang di era yang semakin terbuka dan masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapat, seharusnya upaya untuk mengomunikasikan kebijakan yang hendak ditempuh, semakin intensif dilakukan. Bahkan pemerintah harus semakin cermat dalam membangun komunikasi, karena masyarakat sekarang lebih kritis sehingga harus ada upaya ekstrakeras untuk bisa meyakinkan masyarakat.

“Pada akhirnya lembaga publik harus mendapat kepercayaan dari publik agar semua yang dilakukan memberi manfaat bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sinilah kita harapkan semua orang menjadi lebih paham tentang pentingnya melakukan komunikasi publik yang baik. Semua itu diperlukan agar tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Upaya kita melakukan reformasi dan membangun demokrasi harus bermuara kepada perbaikan kehidupan dari seluruh rakyat,” tutupnya.



**Heri Rakhmadi**  
CEO Bamboedoea Komunikasi

## Langkah-Langkah Strategis Menuju Humas Pemerintah Yang Efektif

Saat ini sedang terjadi apa yang disebut dengan ledakan komunikasi (*communications exploded*). Dalam kebebasan dan keterbukaan informasi yang didorong kemajuan teknologi informasi, persaingan antarmedia semakin ketat, berbagai elemen sosial saling bersaing memperebutkan perhatian publik. Informasi membanjir dari berbagai arah, berbagai media, berbagai kelompok masyarakat, berbagai kekuatan politik, berbagai institusi bisnis, maupun dari instansi pemerintah. Semuanya saling berebut minta perhatian publik.

Anggota publik tidak lagi dihadapkan pada persoalan mencari informasi, tetapi lebih disibukkan untuk memilih informasi. Dari sisi media, kalangan media menjadi semakin selektif dalam menempatkan isi medianya. Mereka hanya mau memuat sesuatu jika menurut pertimbangan mereka informasi itu diminati dan dapat menarik perhatian publik. Informasi hasil pembangunan, siaran pers kegiatan pemerintah, atau peresmian proyek, pengangkatan pejabat, menjadi hal yang kurang mendapat tempat di media massa, kecuali kalau di dalamnya terkandung konflik atau persoalan kontroversi lainnya. Bersamaan dengan itu, reformasi yang bergulir, telah memunculkan pula berbagai tuntutan publik atas desakan perlunya demokratisasi di berbagai sektor.

Dalam kondisi seperti itulah, menurut CEO dan *founder* Bamboedoea Komunikasi Heri Rakhmadi peran humas pemerintah dalam melakukan komunikasi publik yang efektif menjadi persoalan yang tidak mudah. Humas pemerintah, kata Heri, harus bekerja dengan langkah yang strategis agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Pertama, mengetahui posisi (*know your position*). Posisi di mata media, di mata publik dan di stakeholder utama. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dan memahami isu-isu strategis yang

berkembang. Kedua, tentukan tujuan. Dalam menunjukkan tujuan harus spesifik dan jangan terlalu *absurd* alias tidak jelas. Tujuan juga harus terukur (*measurable*), terjangkau (*achievable*), realistis (*realistic*), dan waktu yang ketat (*time-bound*). Tiga, perencanaan dan penyusunan program yang harus memenuhi kaidah-kaidah manajemen seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Keempat, ambil tindakan dan komunikasikan. Untuk langkah strategis keempat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain menganalisis situasi dan menentukan tujuan; menentukan *target audience*; menetapkan strategi pesan; menetapkan strategi media; memilih taktik dan teknik kehumasan serta implementasi. Kelima, menurut Heri adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang bisa dilakukan melalui survei, *focus group discussion* (FGD), analisis media, atau melakukan komparasi dengan lembaga lain. Langkah strategis terakhir atau keenam, menurut Heri adalah pengorganisasi dan penganggaran yang tepat guna.

Selama ini, tambah Heri, humas di kementerian/lembaga selalu terbentur persoalan klasik seperti jumlah anggaran yang terbatas dan belum adanya dukungan dari atasan dalam mengimplementasikan program-program kehumasannya. Padahal, kata Heri, masalah tersebut masih bisa diatasi. Contohnya, untuk keterbatasan anggaran solusinya dengan berpikir kreatif. "Pekerjaan humas adalah pekerjaan kreatif. Jadi keterbatasan anggaran bukan persoalan yang utama," tutur Heri. Sementara mengenai belum adanya dukungan dari atasan Heri menyarankan agar sejak dini diterapkan model *Good Corporate Governance* (GCG), perencanaan yang baik, dan juga kinerja yang terukur. Saat ini sudah ada beberapa pemerintah yang sudah menjalankan dengan baik program-program kehumasannya seperti Polri dan KPK. "Dengan adanya dukungan dari atasan, humas di kedua lembaga

tersebut dapat dengan mudah mengakses informasi dan menyampaikannya kepada publik," ujar Heri.

Adakalanya, humas pemerintah juga terkendala oleh kemampuan pada sumber daya manusia yang terbatas, utamanya yang mempunyai pemahaman (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) yang baik tentang kehumasan. Untuk masalah tersebut, Heri menyarankan agar humas kementerian/lembaga tidak perlu sungkan-sungkan untuk menggandeng dan membangun sinergi dengan konsultan humas. Bervariasinya kebutuhan tiap organisasi dan banyaknya pilihan strategi dan program, mau tidak mau menuntut humas pemerintah perlu dukungan konsultan humas. Apalagi pekerjaan humas merupakan pekerjaan tim yang membutuhkan kerja tim dengan beragam kompetensi. Dengan dukungan konsultan humas, humas pemerintah akan mendapatkan perspektif yang berbeda saat menyusun, mengelola, dan mengimplementasikan strategi kehumasan.. "Sama halnya dengan kebutuhan terhadap seorang dokter, dalam menyusun strategi dan mengimplementasikan program kehumasan, kementerian/lembaga juga membutuhkan konsultan humas untuk mendapatkan sudut pandang yang lain," ujar Heri.

Namun dalam memilih konsultan humas, kementerian/lembaga menurut Heri tidak boleh sembarangan. Prinsip-prinsip kompetensi dan profesionalisme harus tetap dikedepankan. Caranya dengan rekrutmen/tender terbuka, mengecek pengalaman dan reputasi konsultan kehumasan, pelajari proposal yang ditawarkan serta yang terakhir terapkan GCG. "Dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, saya yakin kementerian/lembaga akan mendapatkan konsultan kehumasan yang kompeten dan profesional yang dalam membantu dan meringankan pekerjaan mereka dalam menjalankan program-program kehumasannya," pungkask Heri.



Berfoto bersama sesuai acara Pelantikan BPP Perhumas yang dihadiri oleh **Dewan Pakar** (Dr. Ahmad Fuad Afdal, Muslim Basya), **Dewan Penasehat** (Dr. Dino Patti Djalal, Prita Kemal Gani, Arifin Pasaribu, Billy Boen), **Dewan Pakar** (Henny S. Widyaningsih, Ekoputro Adijayanto, Inke Marris, Dr. Nia Sarinastiti), **Ketua Umum** (Agung Laksamana), **Wakil Ketua Umum** (Heri Rakhmadi, Dr. Widodo Muktiyo), **Sekretaris Umum** (Pamungkas Trishadiatmoko, Risma Kartika), **Bendahara** (Widi Nugroho Sahib), **Bid. Komunikasi & Publikasi** (Achmad Hadiansyah Lubis, Henny Puspitasari Suryanto, Dewianti Tjondronegoro (Ance), Dewi Assaad, Junas Miradiarsyah), **Bid. Perhumas Muda** (Rizka Septiana, Jeffrey Haribowo, Reylando Eka Putra, Rizky Chaerulsyah. Saragih, Taufan Teguh Akbari), **Bid. Kerja Sama** (Faisal Halimi, T. Marlene Danusutedjo, Boy Kelana Soebroto, Troy Warokka), **Bid. Riset & Kompetensi** (Dr. Hifni Alifahmi, Dr. Emilia Bassar, Dr. Mulharnetti Syas, Beryl Masdiary, Dian Noeh Abubakar,) **Bid. Keanggotaan & Pelatihan** (John Daniel Rembeth, Katri Krisnati, Khrisma Fitriarsari), **Bid. Pengembangan BPC** (Tarsih Eka Putra, Hery Kurniawan, Moch N. Kurniawan, Kelik Prakoso)

## Pelantikan BPP Perhumas Periode 2014 – 2017

**P**erhimpunan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) telah melantik pengurus baru Badan Pengurus Pusat (BPP) periode 2014 – 2017. Acara ini digelar pada Sabtu, 28 Februari 2015 di Arion Swiss Belhotel, Kemang, Jakarta Selatan. Nama-nama yang akan memegang kendali di Perhumas selama periode berlangsung merupakan hasil kesepakatan Munas Perhumas yang digelar pada Desember lalu.

Selama tiga tahun ke depan, Perhumas merencanakan tiga tema besar yang akan menjadi dasar dalam menjalankan program-program organisasi. Ketiga tema diantaranya *Educate*, *Engage*, dan *Inspire* yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam segi kompetensi dan profesionalisme kehumasan secara

internal maupun eksternal.

Agung Laksamana terpilih menjadi Ketua Umum BPP Perhumas menyampaikan bahwa dukungan seluruh *stakeholder*, terutama para praktisi humas, membuat Perhumas semakin solid. Amanah yang diberikan oleh seluruh anggota Perhumas merupakan pengabdikan sekaligus tanggung jawabnya terhadap profesi kehumasan. “Saya berharap, dengan BPP yang baru ini, Perhumas dapat mengemban tugas dan komitmen dengan sebaik-baiknya sebagai kontribusi nyata kami kepada profesi kehumasan yang semakin dibutuhkan oleh dunia bisnis di Indonesia,” pesan Agung yang disampaikan di dalam sambutan.

Dalam kesempatan yang sama turut hadir Dino Patti Djalal yang ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Perhumas

yang memberikan arahan kepada para pengurus Perhumas ke depan. Kondisi tarik-menarik antara kubu pro-reformasi dengan anti-reformasi, sambung Dino, merupakan tantangan bagi Perhumas ditantang untuk terus menempatkan diri dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Formasi organisasi BPP Perhumas periode 2014 – 2017 akan memiliki tiga Dewan Utama yaitu Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar. Lalu, BPP Perhumas dipimpin oleh Agung Laksamana sebagai Ketua Umum, Heri Rakhmadi sebagai Wakil Ketua Umum 1, Widodo Muktiyo sebagai Wakil Ketua Umum 2, Ita Kusmawati sebagai Sekretaris Umum, dan Widi Nugroho sebagai Bendahara Umum.



Heri Rakhmadi, Wakil Ketua BPP Perhumas

**Pemimpin Redaksi:** Heri Rakhmadi,  
**Penulis:** Amir A. Gofur, Oddi Arma, Lidya K. Hestya  
**Sekretaris Redaksi:** Susi Susanti, **Grafis:** Wahyu, Budi Rama  
**Alamat:** Jl.Cakra Wijaya II Blok J No. 10  
Kav. Diskum Jakarta Timur - 13420  
**Telp.** +62 21 8591 2743 - 44, **Fax.** +62 21 856 0408  
<http://www.bamboedoea.com>,  
**E-mail:** bamboedoea@bamboedoea.com



**M**eningkatnya penetrasi internet mendorong para penggiat media untuk mengelola media digital sebagai pendamping media konvensional. Perkembangan ini juga turut menyeret lahirnya sosial media sebagai salah satu alat komunikasi yang ampuh. Industri sosial media bahkan terus melahirkan berbagai inovasi dengan fitur yang menarik. Sosial media seperti memiliki sihir tersendiri yang membuat pengguna ketagihan menggunakannya. Hampir semua perusahaan dan pemerintahan di dunia memanfaatkan layanan sosial media untuk promosi maupun sosialisasi. Pertumbuhan sosial media yang semakin pesat ini menuntut semua organisasi di dunia 'bereksperimen' untuk memanfaatkan media social terutama untuk meneguhkan reputasinya di mata public. Itulah poin penting dari Breakfast Forum yang berjudul Social Media & PR Trends 2015 di Jakarta (13/03).

Forum yang dibuka oleh Ketua BPP Perhumas Agung Laksamana ini menghadirkan lima narasumber yaitu Erik Meijer (Mantan Direktur Pemasaran Indosat dan Mantan Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia); Dian Noeh Abubakar (Founder, CEO di Kennedy, Voice & Berliner); Nia Sarinastiti (Dosen Komunikasi Univ. Atmajaya); Atmaji Supto Anggoro (APJII); dan Budi Putra (CEO The Jakarta Post Digital).

Kelima narasumber sepakat bahwa dunia digital adalah hal yang seru dan baru, terlebih sosial media. Sosial media menjelma menjadi medium komunikasi berbasis internet yang banyak diminati. Bahkan, sosial media telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tren ini menjadi hal baru yang menarik bagi industri humas. Praktisi humas masa kini mendapatkan tantangan yang cukup besar dimana mereka tidak hanya harus handal dalam menjalin hubungan internal maupun eksternal

secara langsung, namun juga harus menguasai dunia yang lebih luas dengan sosial media. Banyak terjadi pembicaraan di sosial media yang memaksa perusahaan meningkatkan model komunikasi.

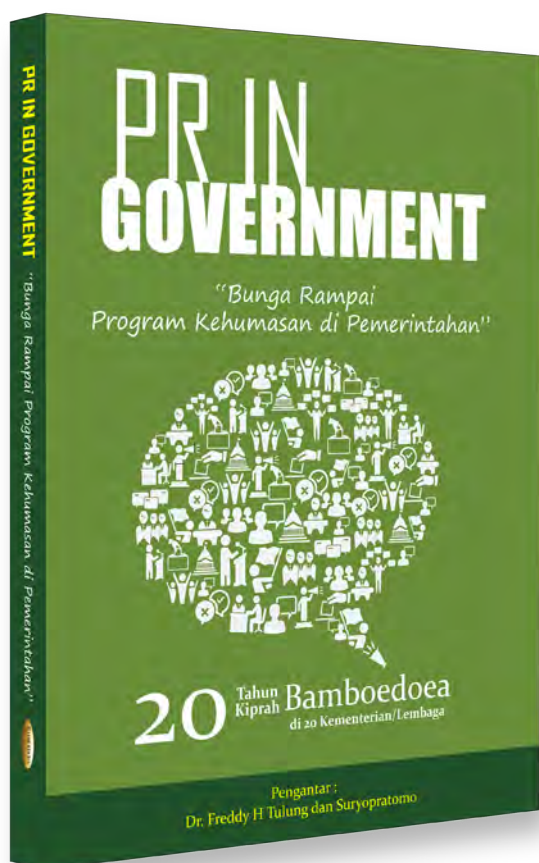
Memang banyak hal yang berubah sejak kemunculan internet. Beberapa tahun yang lalu mungkin tidak terbayangkan bahwa lalu-lintas komunikasi akan secepat sekarang. Hadirnya sosial media sebagai primadona membuat banjirnya informasi di dunia digital. Bayangkan, Microblogging bernama Twitter bisa menjadi alat yang efektif untuk menjalankan dan memelihara hubungan dengan publik bahkan bisa membuat perubahan besar di dunia. Masih lekat dalam ingatan kita keberhasilan rakyat menumbangkan rezim diktator sehingga benar-benar merubah Mesir, Tunisia dan Maroko atau yang kita kenal dengan ArabianSpring. Media sosial juga saat ini mempengaruhi pandangan terhadap dunia kehumasan. CEO Bamboedoea yang juga Wakil Ketua BPP Perhumas Heri Rakhmadi seusa forum ini mengatakan, sosial media hanyalah alat bagi humas untuk berkomunikasi dengan publik. Posisi humas tetap penting untuk menyusun strategi komunikasi melalui sosial media. Dengan munculnya sosial media, jarak antara masyarakat dengan humas menjadi semakin dekat.

"Saat ini, hampir semua Institusi baik swasta maupun pemerintahan lainnya mempunyai akun media sosial terutama twitter dan facebook. Namun, banyak akun yang dikelola hanya share informasi saja, tidak mengoptimalkan fungsi real time dan interaktif medsos yang jika dimanfaatkan secara optimal bisa menjadi medium kampanye yang efektif untuk mendapat dukungan publik terhadap lembaga tersebut dan tentu sebagai media klarifikasi terbaik dan tercepat untuk meluruskan sebuah isu," jelas Heri.



**BERITA FOTO.** CEO Bamboedoea yang juga Wakil Ketua Umum Perhumas saat menjadi narasumber pada FGD membahas standarisasi lembaga sertifikasi profesi, di Fikom, Unpad, Jatinangor. Dalam FGD yang juga dihadiri oleh Freddy H Tulung (Dirjen IKP Kominfo); Hemy Widyaningsih (KIP Pusat), Muslim Basya (Ketua LSP PR-RI); Prita Kemal Ghani (LSPR); Yulandre Darwis (Ketua ISKI Pusat); Prinkey Triputra (UI); Sasa Djuarsa Sendjaja (UI); Atwar Bajari (Ketua APTKP); Dedy Mulyana (Dekan Fikom-Unpad) menyimpulkan bahwa percepatan implementasi dan sertifikasi profesi humas sudah mendesak mengingat Masyarakat Ekonomi Asean sudah di depan mata (Desember 2015).

## Ringkasan Buku

**PR IN GOVERNMENT****Bunga Rampai Program Kehumasan di Pemerintahan  
(Sebuah Model Baru Implementasi GPR)**

**D**ibanding buku-buku yang membahas praktik-praktik terbaik marketing, belum banyak buku yang membahas best practice program kehumasan. Apalagi yang menyangkut praktik terbaik program kehumasan di lembaga pemerintahan, terbilang masih sangat jarang. Oleh karena itu, kehadiran buku setebal 244 halaman ini cukup memberikan angin segar kepada para pembaca khususnya, peminat dan pegiat kehumasan. Dengan membaca buku “PR IN GOVERNMENT. Bunga Rampai Program Kehumasan di Pemerintahan” para pembaca dapat mengetahui dan memahami bagaimana program kehumasan kementerian/lembaga, mulai dari perencanaan hingga eksekusi.

Tidak hanya itu, buku ini juga menyajikan sisi lain atau dibalik layar sebuah program kehumasan dikreasi. Dalam buku ini, misalnya diceritakan tentang penyelesaian kekisruhan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2009. Atau dituliskan juga bagaimana penyelesaian masalah polemik penjualan saham Krakatau Steel saat Kementerian BUMN dipimpin oleh Mustafa Abubakar. Tidak kalah menariknya,

pengalaman Kepala Biro Humas KPU pada Pemilu 1999 Djohermansyah Djohan yang menceritakan suka dukanya mengelola program kehumasan dengan anggaran yang sangat minim di tengah perbedaan pendapat yang tajam antar anggota KPU serta maraknya demonstrasi.

Buku ini yang diterbitkan oleh Bamboedoea Komunikasi ditulis oleh konsultan kehumasan Heri Rakhmadi, Amir A. Gofur, dan Oddi Arma yang merupakan para penggagas dan pelaku program kehumasan kementerian/lembaga yang tertulis dalam buku. Secara keseluruhan buku ini terdiri dari 29 bab. Di dalamnya memuat 20 praktik-praktik kehumasan kementerian/lembaga seperti Media Center KPU Pemilu 1999; Media Center KPU Pemilu 2004; Media Center KPU Pemilu 2009; Pusat Informasi dan Komunikasi Depkumham; Gerai Informasi dan Media Depdiknas; DPD RI; Penanganan Krisis Bulog; Media Center Pilkada Aceh 2006; Humas Kementerian PPN/Bappenas; Program Sosialisasi REDD+; Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum; Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum; PuskomPu Kementerian PU; Kementerian BUMN; hingga Kampanye Caleg Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada bagian akhir buku ini juga disajikan testimoni beberapa pimpinan Kementerian/Lembaga seperti: Mustafa Abubakar, Hamid Awaluddin, Husni Kamil Manik, Djohermansyah Djohan, Irman Gusman, Refly Harun, Maruhum Batubara, Subagio, serta beberapa pimpinan media massa yang pernah menjadi mitra kerja Bamboedoea Komunikasi selaku konsultan program kehumasan kementerian/lembaga yang program-program kehumasannya ditulis dalam buku ini.

Sekiranya, buku yang pengantarnya ditulis oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H. Tulung dan wartawan senior Suryopratomo dapat memberikan tawaran dan perspektif baru implementasi humas pemerintah (*Government Public Relations*) di tengah ledakan komunikasi (*communications exploded*) yang terus bergulir.

Judul	: PR In Government - Bunga Rampai Program Kehumasan di Pemerintahan
Penulis	: Heri Rakhmadi, Amir A. Gofur, Oddi Arma
Penerbit	: Bamboedoea Komunikasi
Tebal/Ukuran	: 256 Halaman / 17 x 24 cm
Cetakan I	: Januari 2015
Harga	: Rp 95.000,- ( <i>Jabodetabek</i> ) * <i>Jabodetabek - free ongkos kirim</i> ** <i>Jawa dan Luar Jawa + ongkos kirim</i>
Kontak	: Indra Karimah (0857 1584 1899)